

PROSIDING

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM RANGKA MODERNISASI ADMINISTRASI PERTANAHAN DI INDONESIA

Hotel Century Park Jakarta
21 November 2017



**DITERBITKAN OLEH:
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
2017**

PROSIDING

endaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Rangka Modernisasi Administrasi Pertanahan di Indonesia

Hotel Century Park Jakarta
21 November 2017

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2017

**PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM RANGKA MODERNISASI
ADMINISTRASI PERTANAHAN DI INDONESIA**

Diterbitkan Oleh:

Pusat Penelitian dan Pengembangan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Jl. H. Agus Salim No.58 Jakarta Pusat 10350

Cetakan Pertama - Desember 2017

ISBN: 978-979-1069-65-6

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku ini tanpa izin tertulis dari Pemegang Hak Cipta.

REVIEWER

RB Agus Widjayanto, S.H., M.Hum

Djamaluddin, S.H., M.Hum

Uke Muhammad Hussein, S.Si, MPP

Dr. Ir. Irawan Sumarto, M.Sc.

TIM EDITOR

Ir. Eliana Sidipurwanti, M.Si

Romi Nugroho, S.Si

Drs. Makmur A. Siboro, M.Eng.Sc

Ika Dini Haryanti, S.Kom

Jauhari Thonthowi, S.Si

Aulia Latif, S.T., MSISc

Melia Yusri, SP

KEPANITIAN FORUM ILMIAH

PENANGGUNG JAWAB

Ir. Izda Putra, M.M

(Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan)

KETUA

Drs. Makmur A. Siboro, M.Eng.Sc

(Kepala Bidang Publikasi dan Perpustakaan)

ANGGOTA

Ika Dini Haryanti, S.Kom

(Kepala Subbidang Publikasi)

Robin T.H. Sijabat, S.Kom

(Kepala Subbidang Program)

Eri Khaeruman Khuluki, S.P., M.Si

(Kepala Subbidang Kerja Sama)

Halim Kuswoyo, S.SiT

(Kepala Subbidang Perpustakaan)

Dr. Sigit Santosa, S.Si., M.App.Sc

(Kepala Seksi Perencanaan Konsolidasi Tanah)

Hotman Pardomuan, S.H., M.Kn

(Kepala Seksi Tanah dan Ruang Wilayah IIA)

Septina Marryanti P., S.Si., M.Si

(Peneliti Pertama)

Melia Yusri, S.P

(Penyusun Bahan Penyelenggaraan Litbang)

Jauhari Thonthowi, S.Si

(Penyusun Bahan Penyelenggaraan Litbang)

Aulia Latif, S.T., MSISc

(Penyusun Bahan Penyelenggaraan Litbang)

Probo Socowibowo, S.Kom., M.AP

(Penyusun Bahan Penyelenggaraan Litbang)

Shofiatul Munawaroh, S.Kom

(Penyusun Bahan Penyelenggaraan Litbang)

Wina Dwi Febrina, S.P., M.Si

(Penyusun Bahan Penyelenggaraan Litbang)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karuniaNya, sehingga prosiding kegiatan Forum Ilmiah Pusat Penelitian dan Pengembangan dapat selesai tersusun. Prosiding ini berisikan kumpulan makalah terpilih yang telah melalui seleksi oleh beberapa reviewer dan dipresentasikan dalam acara Forum Ilmiah yang dilaksanakan pada tanggal 21 November tahun 2017 di Hotel Century Park Jakarta. Forum Ilmiah tahun 2017 mengusung tema "Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Rangka Modernisasi Administrasi Pertanahan di Indonesia".

Dari 10 (sepuluh) makalah yang terpilih, dibagi ke dalam 2 (dua) subtema. Subtema Teknologi terdiri dari 5 judul makalah, yaitu : (1) Penggunaan Teknologi UAV/Drone untuk Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; (2) Pengembangan Sistem Informasi Kadastral Empat Dimensi (4D) dalam Penyelesaian Sengketa pada Pendaftaran Tanah; (3) "Reformasi SKP-KKPWEB dan Komisi Khusus" sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konflik dalam Momentum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; (4) Analisis Pemetaan Pola Spasial Nilai NJOP dan Jumlah Bidang Tanah Terdaftar untuk Penentuan Lokasi Prioritas PTSL (Studi Pada Kecamatan Kayen dan Sukolilo Kabupaten Pati); dan (5) Sistem Proyeksi Distorsi Minimum untuk Mensukseskan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Makalah dengan subtema Hukum dan Manajemen terdiri dari 5 (lima) makalah, yaitu : (1) Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Sistematis Lengkap dan Alternatif Penyelesaiannya (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Utara); (2) Peningkatan Access Reform Pelayanan Sertipikasi Tanah sebagai Modal Usaha di Pasar Desa Melalui Pendaftaran Tanah di Kabupaten Banjar; (3) Evaluasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; (4) Dampak Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Sosial Ekonomi Petani di Kelurahan Lancirang Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang; (5) Gerakan Nasional Pendaftaran Tanah Melalui Pelibatan Multipihak (*Penta Helix*).

Dalam proses penyempurnaannya, kami mengharapkan kritik dan saran untuk peningkatan kualitas Forum Ilmiah maupun penyusunan prosiding ini. Semoga prosiding ini dapat bermanfaat khususnya bagi pegawai di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta seluruh pembaca pada umumnya sebagai referensi dalam khasanah keilmuan administrasi pertanahan.

Jakarta, Desember 2017

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
MAKALAH SUBTEMA TEKNOLOGI	1
Penggunaan Teknologi UAV/ <i>Drone</i> Untuk Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	2
Pengembangan Sistem Informasi Kadastral Empat Dimensi (4D) dalam Penyelesaian Sengketa Pada Pendaftaran Tanah	29
“Reformasi SKP-KKPWEB dan Komisi Khusus” Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konflik Dalam Momentum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	43
Analisis Pemetaan Pola Spasial Nilai NJOP dan Jumlah Bidang Tanah Terdaftar Untuk Penentuan Lokasi Prioritas PTSL (Studi Pada Kecamatan Kayen dan Sukolilo Kabupaten Pati).....	62
Sistem Proyeksi Distorsi Minimum Untuk Mensukseskan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	86
NOTULEN SUBTEMA TEKNOLOGI	109
MAKALAH SUBTEMA HUKUM DAN MANAJEMEN	115
Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Sistematis Lengkap dan Alternatif Penyelesaiannya (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Utara).....	116
Peningkatan Access Reform Pelayanan Sertipikasi Tanah Sebagai Modal Usaha di Pasar Desa Melalui Pendaftaran Tanah di Kabupaten Banjar	136
Evaluasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	160
Dampak Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Sosial Ekonomi Petani di Kelurahan Lancirang Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang.....	186
Gerakan Nasional Pendaftaran Tanah Melalui Pelibatan Multipihak (<i>Penta Helix</i>)	207
NOTULEN SUBTEMA HUKUM DAN MANAJEMEN.....	229

**DAMPAK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TERHADAP
SOSIAL EKONOMI PETANI DI KELURAHAN LANCIRANG
KECAMATAN PITU RIAWA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Fadhil Surur

Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar

fadhil.surur@uin-alauddin.ac.id

ABSTRAK

Kondisi sosial ekonomi masyarakat petani di Kelurahan Lancirang dipengaruhi oleh status kepemilikan tanah yang dikelola untuk kegiatan pertanian. Diperlukan dukungan kepastian hukum terhadap status kepemilikan tanah yang dikelola. Program nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidrap secara langsung kepada masyarakat petani di Kelurahan Lancirang. Kawasan kajian merupakan kawasan yang memiliki potensi lahan pertanian produktif dengan sistem irigasi yang memadai. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kegiatan PTSL, menganalisa dampak PTSL terhadap kondisi sosial ekonomi petani dan merumuskan rekomendasi dalam pelaksanaan PTSL. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data primer diperoleh dengan dari kuesioner dengan sampel indeks slovin sehingga diperoleh sampel sebesar 106 responden. Data dianalisis menggunakan pendekatan analisis deskriptif, analisis regresi berganda dan paired sample test. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat petani sebelum dan sesudah program PSTL didorong oleh sistem PTSL itu sendiri yaitu waktu, prosedur dan biayanya. Masyarakat petani lebih memilih program PTSL dibandingkan mendaftar secara pribadi. Dampak sosial ekonomi yang signifikan setelah dilakukan PSTL adalah dampak rasa aman, akses kredit, kemudahan menjual, dan harga tanah. Sedangkan dampak penyelesaian konflik tidak signifikan. Arah kebijakan pengelolaan PTSL dapat dipertimbangkan mencakup penambahan SDM, membangun database, dan meningkatkan fungsi kontrol atau pengawasan, prioritas lahan pertanian produktif dan optimalisasi penyuluhan.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pada saat ini laju pembangunan sektor pertanian semakin tertinggal dibandingkan dengan sektor – sektor lainnya, sektor pertanian diprediksi akan terus menurun dalam perekonomian nasional (Poerwanto, 2008). Kemunduran sektor pertanian di Indonesia ditandai dengan penurunan produktivitas pada kisaran -1,97% (BPS, 2017). Sistem pertanian nasional mengalami permasalahan dari berbagai segi, salah satunya masalah agraria. Hal ini menjadi sendi-sendi masalah tani, dimana menyangkut soal hidup dan penghidupan para petani (Tauchid & Soetarto, 2009).

Sebuah tahap baru dalam kebijakan pertanahan dan pertanian di Indonesia adalah mempercepat pembentukan pasar tanah melalui reformasi manajemen dan administrasi pertanahan yang dimulai dengan kebijakan Bank Dunia yang merekomendasikan serangkaian rencana aksi (Rachman, 2012). Teorisasi *land reform* di negara berkembang ditandai dengan legalisasi atau perundang-undangan terhadap tanah yang akan meredistribusi kepemilikan, mewujudkan hak atas tanah pertanian dan dijalankan untuk memberi manfaat pada masyarakat tani dengan cara meningkatkan status, kekuasaan dan pendapatan absolut (Lipton, 2009). Program tersebut kemudian dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional dalam rangka mewujudkan reforma agraria dengan upaya legalisasi seluruh bidang tanah di Indonesia. Kebijakan pemberian hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya, maka perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah lengkap di seluruh wilayah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap No. 5 tahun 2012 RTRW Kabupaten Sidrap tahun 2012 – 2032 mengarahkan tujuan penataan ruang sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan yang maju dan sejahtera dengan berbasis pada pembangunan agribisnis modern. Kebijakan tersebut didukung dengan potensi pertanian yang menyumbang 33% dari total PDRB dengan 575,50 ha sawah berada di Kelurahan Lancirang Kecamatan Pitu Riawa. Pengembangan potensi pertanian tersebut mengalami kendala terkait dengan legalisasi tanah yang dikelola oleh masyarakat setempat. Sehingga dengan kebijakan nasional melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Pemerintah Kabupaten Sidrap diharapkan mampu meningkat produktivitas pertanian dengan

menjamin kepastian hukum tanah yang dikelola. Hal ini penting dilaksanakan karena yang mayoritas pendaftarannya adalah masyarakat petani di Kelurahan Lancirang.

Sumber daya agraria merupakan sumber nafkah yang akan menentukan seberapa jauh jangkauan para petani dalam memenuhi kebutuhan pangan, perumahan, pendidikan, dan unsur kesejahteraan lainnya (Sajogyo, 1985 dalam Ariwijayanti, 2011). Sehingga dengan adanya kepastian hukum melalui sertifikasi tanah secara sistematis dan lengkap, petani akan memperoleh keuntungan yang lebih dari aktivitas pertanian yang dilaksanakan. Berdasarkan data dari ATR/BPN Kabupaten Sidrap bahwa jumlah tanah yang telah disertifikasi di Kelurahan Lancirang mencapai 1.336 bidang, 145 orang diantaranya merupakan petani yang telah terdaftar dalam program ini. Proses PTSL di Kelurahan Lancirang dilakukan sesuai dengan prosedur pelaksanaan dalam peraturan menteri. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilaksanakan penelitian untuk mengukur sejauh mana program PTSL ini berdampak pada sosial ekonomi petani di Kelurahan Lancirang Kabupaten Sidrap.

1.2. Rumusan Masalah

- a. Faktor faktor apa yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kegiatan PTSL?
- b. Bagaimana dampak PTSL terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat petani?
- c. Bagaimana arahan dan rekomendasi pelaksanaan PTSL bagi masyarakat petani?

1.3. Tujuan

- a. Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kegiatan PTSL.
- b. Menganalisa dampak PTSL terhadap kondisi sosial ekonomi petani.
- c. Merumuskan arahan dan rekomendasi pelaksanaan PTSL bagi masyarakat petani.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Agraria

Agraria mempunyai arti yang sangat berbeda antara bahasa yang satu dengan bahasa lainnya. Dalam Bahasa Latin kata agraria berasal dari kata *ager* dan *agrarius*. Kata *Ager* berarti tanah atau sebidang tanah, sedangkan kata

agrarius mempunyai arti sama dengan "perladangan, persawahan, atau pertanian". Dalam bahasa Inggris kata agraria diartikan agrarian yang selalu diartikan tanah dan dihubungkan dengan usaha pertanian. Pengertian agraria ini, sama sebutannya dengan *agrarian laws* bahkan sering kali digunakan untuk menunjuk kepada perangkat peraturan hukum yang bertujuan mengadakan pembagian tanah-tanah yang luas dalam rangka lebih meratakan penguasaan lahan dan pemilikan tanah. Pengertian agraria dapat pula dikemukakan dalam undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Jika dijabarkan pengertian tanah menurut pasal 4 ayat 1 adalah permukaan bumi, sedangkan pengertian Bumi menurut pasal 1 ayat 4, yaitu selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi serta yang berada di bawah air. Adapun yang termasuk bumi Indonesia tidaklah terbatas pada yang berada di bawah batas-batas perairan Indonesia saja, yaitu perairan pedalaman (*inland waters*) dan laut wilayah (*territorial waters*) melainkan bumi yang berada di bawah air laut diluar batas-batas itu.

2.2. Pendaftaran Tanah

Rudolf Hemanses (Chomzah, 2004) merumuskan mengenai apa yang dimaksud dengan pendaftaran tanah (kadaster) yaitu pembukuan bidang-bidang tanah dalam daftar-daftar, berdasarkan pengukuran dan pemetaan yang seksama dari bidang-bidang itu. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya (Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997).

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali atas prakarsa pemerintah, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan,

mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

2.3. Administrasi Pertanahan

Administrasi pertanahan adalah pemberian hak, perpanjangan hak, pembaruan hak, peralihan hak, peningkatan hak, penggabungan hak, pemisahan hak, pemecahan hak, pembebanan hak, izin lokasi, izin perubahan penggunaan tanah, serta izin penunjukan dan penggunaan tanah. Sedangkan menurut Murad mengemukakan bahwa administrasi pertanahan adalah suatu usaha dan kegiatan suatu organisasi dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakankebijakan pemerintah di bidang pertanahan dengan menggerakkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Hermit, 2007).

PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

2.4. Konsep Pertanian

Pertanian merupakan tulang punggung bagi kehidupan di pedesaan, aspek ekonomi desa dan peluang kerja berkaitan erat dengan masalah kesejahteraan masyarakat desa. Kecukupan dan keperluan ekonomi bagi masyarakat dikatakan terjangkau bila pendapatan rumah tangga cukup untuk menutupi keperluan rumah tangga dan pengembangan usaha-usahanya yang sebagian besar didapatkan dari aspek pertanian. Interaksi yang dilakukan oleh individu-individu dalam memenuhi kebutuhannya, mengakibatkan dinamika sosial ekonomi masyarakat pedesaan. Kondisi sosial ekonomi sebagai kaitan antara status sosial dan kebiasaan hidup sehari-hari yang telah membudaya bagi individu atau kelompok dimana kebiasaan hidup yang membudaya ini biasanya disebut dengan *culture activity*. Kemudian semua masyarakat di dunia baik yang sederhana maupun yang kompleks, pola interaksi atau pergaulan hidup antara individu menunjuk pada perbedaan kedudukan dan derajat atau status kriteria dalam membedakan status pada masyarakat yang kecil biasanya sangat sederhana, karena di samping jumlah warganya yang relatif sedikit, juga orang-orang yang di anggap tinggi statusnya tidak begitu banyak jumlah dan ragamnya.

2.5. Sosial Ekonomi Petani

Petani adalah sebagian penduduk yang secara eksistensial terlibat dalam pores cocok tanam dan secara otonom menetapkan keputusan atas cocok tanam tersebut. Pertanian terbagi dalam dua golongan, yaitu pertanian primitif dan pertanian modern. Pertanian primitif diartikan sebagai petani yang bekerja mengikuti metode-metode yang berasal dari orang-orang tua dan tidak menerima pemberitahuan (inovasi). Mereka yang mengharapkan bantuan alam untuk mengelola pertaniannya. Sedangkan pertanian modern diartikan sebagai yang menguasai pertumbuhan tanaman dan aktif mencari metode-metode baru serta dapat menerima pembaruan (inovasi) dalam bidang pertanian (Mosher, 1983).

Memberi penjelasan tentang hubungan sosial dan interaksi sosial baik langsung maupun tidak langsung memberikan arti yang sama dalam kedua hal tersebut (Syani, 1987). Faktor sosial ekonomi petani di pedesaan dipengaruhi oleh berbagai hal yaitu jumlah anggota keluarga, lama bermukim, tingkat pendidikan, tingkat pendapatann, lamanya penggunaan lahan, tingkat umur, jumlah lahan yang dimiliki, jumlah anggota keluarga produktif, gaya hidup dan kepemilikan tempat tinggal, barang-barang berharga rumah tangga dan hewan peliharaan rumah tangga (sapi, kerbau, ayam, bebek, dan lain-lain).

3. METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Lancirang Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap sebagai salah satu wilayah percontohan pelaksanaan PTSL di Sulawesi Selatan. Waktu pelaksanaan penelitian September sampai Oktober 2017.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan kuesioner sesuai dengan sampel yang dibutuhkan serta proses wawancara mendalam bagi informan kunci yang dituju antara lain Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidrap, Lurah Lancirang dan masyarakat setempat. Sedangkan data sekunder berupa data luasan dan jumlah sertipikat, keadaan sosial ekonomi masyarakat, kondisi wilayah dan peraturan yang terkait. Sumber data diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidrap, Badan Pusat Statistik, Pemerintah Kelurahan Lancirang, Gabungan Kelompok Tani Lancirang dan Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

a. Survei lapangan

Survei lapangan secara langsung dilaksanakan untuk memperoleh gambaran kondisi wilayah penelitian

b. Kuesioner dan Wawancara

Kuesioner dilakukan pada responden yang telah ditetapkan secara terstruktur dan didukung dengan wawancara mendalam untuk menguatkan hasil penyebaran kuesioner

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh literatur pendukung yang terkait dengan topik penelitian.

3.4. Populasi dan Sampel

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidrap. Jumlah total masyarakat yang bekerja dibidang pertanian mencapai 388 dan yang telah melakukan pendaftaran PTSL adalah sebanyak 145 orang. Sehingga dengan menggunakan rumus slovin diperoleh sampel sebesar 106 responden dengan derajat ketelitian sampel 5%.

3.5. Teknik Analisis Data

Penelitian menggunakan beberapa teknik analisis data yang disesuaikan dengan tujuan penelitian yang mencakup :

a. Analisis Deskriptif

Analisis yang digunakan untuk pencarian fakta yang kemudian diinterpretasikan sesuai dengan masalah penelitian. Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2009). Analisis deskriptif akan memperoleh gambaran karakteristik masyarakat petani dan dampak dari PTSL terhadap sosial ekonomi masyarakat.

b. Analisis Linear Berganda

Dalam mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi responden terhadap PTSL digunakan model analisis regresi linear berganda. Analisis regresi adalah sebuah alat analisis statistik yang memberikan penjelasan tentang pola hubungan (antara dua variabel atau lebih). Tujuan dari analisis regresi ini adalah meramalkan nilai rata-rata satu

variabel. Metode ini sebenarnya menggambarkan hubungan antara peubah bebas atau independen (Y) dengan peubah tak bebas atau dependen (X) mencakup pendidikan (X_1), usia pendaftar (X_2), prosedur PTSL (X_3), waktu PTSL (X_4) dan biaya PTSL (X_5), adapun persamaannya adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Dimana :

Y : Pelaksanaan Program PTSL

X : Faktor yang diduga mempengaruhi petan untuk mengikuti program

β : Koefisien regresi

ε : Error Term

c. Analisis Paired Sample Test

Paired-Sample T Test adalah analisis dengan melibatkan dua pengukuran pada subjek yang sama terhadap suatu pengaruh atau perlakuan tertentu. Apabila suatu perlakuan tidak memberi dampak, maka perbedaan rata-rata adalah nol. Paired Sample T-test merupakan perhitungan statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis beda dua rata-rata sampel untuk data yang berbentuk interval atau rasio. Untuk melakukan uji t diperlukan data berskala interval atau rasio yang dalam SPSS disebut *scale*. Untuk menguji hipotesis parsial yang tersirat dari hipotesis penelitian, seperti yang dikemukakan dengan rumus berikut :

$$x = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dimana :

r : distribusi student dengan derajat kebebasan (dk) = n-2

r^2 : koefisien korelasi

n : banyaknya sampel

Ketentuan dari uji hipotesis ini yaitu: H_0 : tidak ada perbedaan yang nyata pada kondisi sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Lancirang sebelum dan setelah pelaksanaan PTSL, sedangkan H_a : Ada perbedaan yang nyata pada kondisi sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Lancirang sebelum dan setelah adanya program PTSL penolakan hipotesisnya adalah jika t hitung > t tabel maka H_0 ditolak dan H_a

diterima. Sedangkan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Wilayah



Gambar 1. Kondisi wilayah penelitian

Sumber : survey lapangan, 2017

a. Kondisi Geografis

Kelurahan Lancirang terletak di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap dengan letak geografis pada $3^{\circ}55'09.0''S$ bujur timur $119^{\circ}56'18.5''E$ lintang selatan dengan batas geografis mencakup :

Sebelah utara	: Desa Sumpang Mango
Sebelah selatan	: Kabupaten Wajo
Sebelah timur	: Kelurahan Ponrange
Sebelah barat	: Desa Padangloang

Wilayah kajian berjarak 19 km dari ibukota Kabupaten Sidrap. Karakteristik wilayahnya secara keseluruhan merupakan dataran rendah dengan kemiringan lereng 0 – 2 %. Sedangkan jenis tanah berupa jenis Alluvial Coklat Kelabu yang potensial untuk dimanfaatkan pada kegiatan pertanian. Luas wilayah secara keseluruhan mencapai 6,55 km². Kelurahan Lancirang berada pada lokasi yang strategis (Gambar 1 dan Gambar 2) karena dilintasi oleh jalan provinsi yang memungkinkan untuk maksimalisasi distribusi hasil pertanian ke daerah lain.

na dan Ha



Kabupaten
jur timur
up :

en Sidrap.
an rendah
erupa jenis
a kegiatan
6,55 km².
ambar 1 dan
ungkinan



Gambar 2. Peta Kelurahan Lancirang

Sumber : RTRW Kabupaten Sidrap dan Peta RBI Bakosurtanal

b. Aspek Kependudukan

Secara umum jumlah penduduk total mencapai 2.662 jiwa, dengan jumlah KK sebanyak 803 dan kepadatan penduduk 406 jiwa/km². Jumlah penduduk laki – laki sebanyak 1.275 sedangkan jumlah penduduk perempuan mencapai 1.387. Perkembangan jumlah penduduk (Tabel 1) di Kelurahan Lancirang hanya mengalami perkembangan jumlah penduduk rata-rata 33 jiwa pertahun dari tahun 2011-2015.

Tabel 1. Perkembangan jumlah penduduk

No	Tahun	Jumlah Penduduk
1	2011	2499
2	2012	2534
3	2013	2569
4	2014	2601
5	2015	2632

Sumber : BPS Kabupaten Sidrap, 2017

c. Potensi Tenaga Kerja

Besarnya potensi pertanian di Kelurahan Lancirang didukung dengan jumlah sumber daya manusia berupa tenaga kerja yang bergerak di bidang pertanian yang mencapai 388 jiwa. Selain itu jasa perdagangan juga banyak diusahakan oleh masyarakat yang mencapai 59 jiwa. Selengkapnya pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Tenaga Kerja

No	Jenis	Jumlah
1	Pertanian	388
2	Peternakan	2
3	Perkebunan	30
4	Perdagangan	59
5	Perindustrian	27
6	Pertambangan	2
7	Listrik dan Air Minum	3
8	Pengangkutan dan komunikasi	22
9	Perbankan	2
10	Pemerintahan/jasa	36
11	Lainnya	27

Sumber : BPS Kabupaten Sidrap, 2017

d. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan yang diusahakan oleh masyarakat setempat didominasi oleh penggunaan lahan sawah yang mencapai 575,50 ha atau sekitar 87,86% dari luas wilayah Kelurahan Lancirang. Selebihnya 79,50 ha merupakan pekarangan, perkebunan dan lahan permukiman beserta sarana dan prasarananya (Tabel 3).

Tabel 3. Luas penggunaan lahan

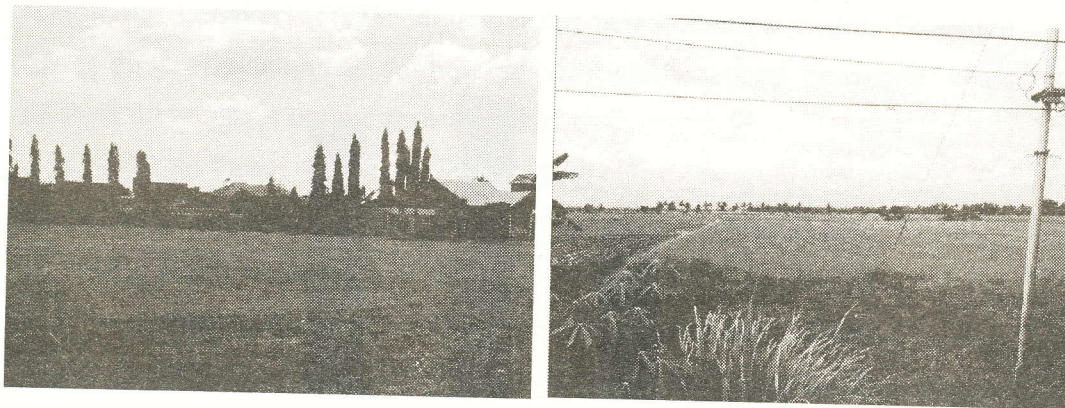
No	Jenis	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Sawah	575,50	87.86
2	Pekarangan	20,82	3.18
3	Perkebunan	54,16	8.27
4	Permukiman	4,52	0.69
Jumlah		655	100

Sumber : BPS Kabupaten Sidrap, 2017

e. Potensi Pertanian

Potensi pertanian dipengaruhi oleh ketersediaan lahan untuk kegiatan pertanian. Secara umum lahan pertanian (Gambar 3) di Kelurahan Lancirang adalah lahan pertanian teknis 317,71 ha sedangkan lahan pertanian semi teknis 257,79 ha. Masyarakat setempat dapat memanen 3-4 kali setahun dengan pasokan air yang stabil melalui sistem irigasi.

Selain potensi pertanian, kawasan ini juga memiliki potensi tanaman sayuran antara lain komoditi jagung, ubi kayu, kacang tanah, kacang kedelai, kacang panjang dan cabe rawit. Sedangkan potensi tanaman perkebunan berupa jeruk siam, mangga, pisang dan durian. Jenis tanaman yang diusahakan pada perkebunan rakyat terdiri dari kelapa, kakao, jambu mete dan kemiri. Potensi peternakan yang teridentifikasi berupa sapi, kambing dan jenis ternak unggas



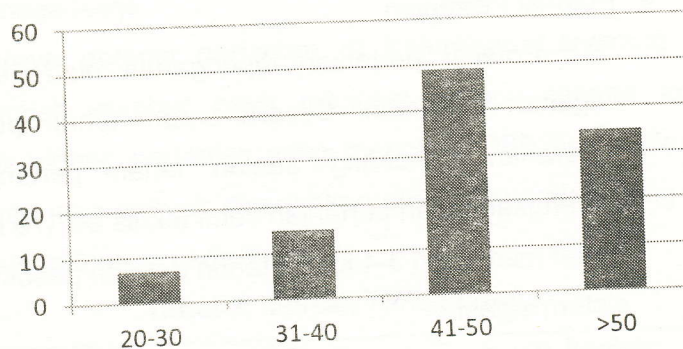
Gambar 3. Potensi lahan pertanian

Sumber : survey lapangan, 2017

4.2. Karakteristik Responden

a. Umur Responden

Peubah umur dari total responden cukup bervariasi. Peubah umur ini dibagi menjadi empat bagian yaitu kelompok umur antara 20 tahun sampai 30 tahun, kelompok umur antara 31 tahun sampai 40 tahun, kelompok umur antara 41 tahun sampai 50 tahun dan kelompok umur lebih dari 51 tahun. Umur total responden didominasi oleh kelompok umur antara 41 tahun sampai 50 tahun yaitu sebanyak 46.23% persen (Gambar 4).

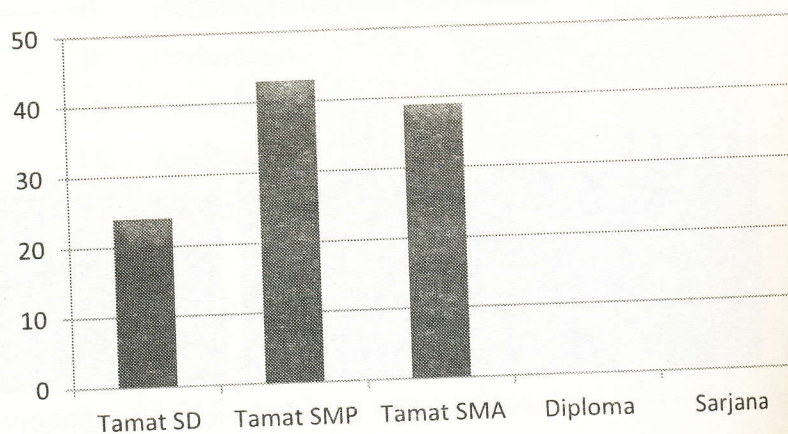


Gambar 4. Kelompok umur responden

Sumber : hasil olah data, 2017

b. Tingkat Pendidikan

Gambaran umum tingkat pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada Gambar 5. Secara umum responden memiliki latar belakang pendidikan tamat SMP dengan persentase sebanyak 40,57%.

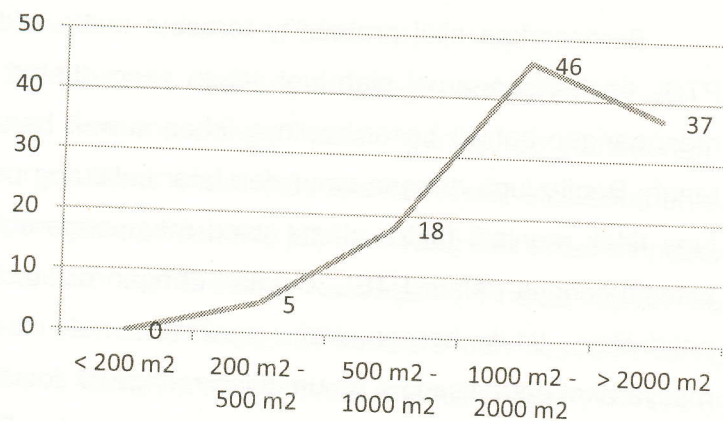


Gambar 5. Tingkat pendidikan responden

Sumber : hasil olah data, 2017

c. Luas Kepemilikan Lahan

Sedangkan profil lahan sawah yang dimiliki oleh responden pada umumnya sekitar 82% merupakan tanah warisan sisanya sebanyak 18% adalah tanah pembelian. Luas rata-rata tanah yang dimiliki responden mencapai rata-rata 1000 m² – 2000 m² sekitar 43,40% dan luas lahan >2000 m² atau mencapai 34,91%, selengkapnya pada Gambar 6.



Gambar 6. Luas kepemilikan sawah

Sumber : hasil olah data, 2017

4.3. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Petani terhadap Program PTSL

Keterlibatan masyarakat petani pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penilaian faktor secara keseluruhan menggunakan metode regresi berganda. Hasil analisis ditampilkan pada Tabel 4 berikut :

Tabel 4. Faktor – faktor yang mempengaruhi

Status	Coef	Std error	Probability
Luas lahan	-0.396	0.315	0.208
Pendidikan	-0.035	0.383	0.926
Umur	-0.132	0.162	0.415
Prosedur PTSL	0.607	0.225	0.007
Waktu PTSL	1.114	0.299	0.000
Biaya PTSL	1.436	0.417	0.001
Konstanta	-3.978	1.588	0.012

Sumber : hasil olah data, 2017

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi responden untuk mengikuti program PTSL adalah dipengaruhi oleh sistem PTSL sedangkan faktor karakteristik responden tidak signifikan pada tingkat $t \alpha=5$ persen. Sistem PTSL diukur dengan pendekatan prosedur, waktu dan biaya yang digunakan mempengaruhi responden secara signifikan dengan nilai masing masing faktor tersebut yaitu 0,007; 0,000; dan 0,0001.

Berdasarkan nilai probability tersebut maka faktor utama mengikuti PTSL tidak dipengaruhi oleh luas lahan yang dimiliki. Dimana responden menganggap bahwa besar kecilnya lahan sawah harus memiliki sertipikat tanah. Begitu juga dengan umur dan latar belakang pendidikan responden juga tidak menjadi faktor utama yang mempengaruhi responden terhadap keterlibatannya dalam PTSL. Sejalan dengan hal tersebut baik umur dan pendidikan tidak berpengaruh signifikan, hal ini disebabkan karena masyarakat petani secara umum telah mengikuti sosialisasi, sehingga telah memiliki gambaran tentang program ini sebelumnya. Pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat petani di Kelurahan Lancirang dalam keikutsertaannya pada program PTSL adalah pada sistem PTSL itu sendiri. Dimana dengan prosedur, waktu dan biaya yang dikeluarkan menjadi faktor utama. Masyarakat menilai sistem ini lebih mudah dan terpercaya dibandingkan mendaftarkan secara pribadi.

4.4. Dampak Program PTSL

Dampak program PTSL diukur berdasarkan variabel sosial ekonomi (Sugiyanto, Siregar, & Soetarto, 2008) yang mencakup:

a. Rasa Aman

Program PTSL memberikan dampak positif terhadap segi sosial pemilik lahan yang diukur dengan rasa aman terhadap aset yang dimiliki. Berdasarkan hasil analisis perbedaan rasa aman sebelum dan sesudah memiliki sertipikat signifikan dengan $t = -21,026$, dengan tingkat signifikan (α) 5% dan derajat kebebasan 19 (Tabel 5). Sehingga diinterpretasikan bahwa petani di Kelurahan Lancirang memiliki rasa aman dibandingkan sebelum melakukan pendaftaran PTSL. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Terdapat perbedaan antara rasa aman sebelum dan sesudah berpartisipasi dalam PTSL. Sertipikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat serta memberikan rasa aman dan tentram bagi pemiliknya (Nae, 2013).

Tabel 5. Hasil analisis variabel rasa aman

Pengamatan	Rata -rata	Jumlah	Signifikansi	T-hitung
Sebelum	2,650	106	0,0000	-21,026
Sesudah	3,665	106		

Sumber : hasil olah data, 2017

b. Akses Kredit

Keterbukaan akses kredit bagi pemilik tanah yang sah dengan sertifikat, berbeda dengan petani penggarap (lahan non milik) tidak mempunyai akses untuk mendapatkan kredit atau bantuan dari lembaga keuangan karena tidak ada jaminan yang sah untuk mendapatkan akses pada bantuan dari lembaga keuangan (Winarso, 2012). Hasil analisis diperoleh bahwa akses kredit sebelum dan sesudah mengikuti PTSL mengalami kemudahan. Dimana memiliki nilai $t = -14,658$ dengan signifikan (α) 5% dan derajat kebebasan 19 (Tabel 6). Responden menyatakan akses kredit lebih mudah setelah mereka memperoleh sertifikat tanah dari program PTSL. Akses kredit akan berpengaruh pada tinggi atau rendahnya produktivitas lahan yang dikelola. Rendahnya produktivitas disebabkan oleh ketidaksesuaian lahan, teknik budidaya yang belum optimal, kesulitan kredit/modal, bias kebijakan pemerintah, dan instabilitas harga (Eka, 2013).

Tabel 6. Hasil analisis variabel akses kredit

Pengamatan	Rata -rata	Jumlah	Signifikansi	T-hitung
Sebelum	2,910	106	0,0000	-14,658
Sesudah	3,750	106		

Sumber : hasil olah data, 2017

c. Kemudahan menjual

Lahan merupakan aset yang sangat strategis bagi petani beberapa petani menjual lahan dengan beragam, namun yang terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan rumah tangga lebih menonjol dari pada alasan yang terkait dengan motif perbaikan taraf hidup melalui perpindahan profesi (Sumaryanto, 2010). Hipotesis awal diprediksi bahwa setelah terbitnya sertifikat melalui program PTSL maka masyarakat akan lebih mudah menjual tanah yang dimiliki. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai $t = -11,487$ dimana tingkat signifikan (α) 5% dan derajat kebebasan 19 (Tabel 7). Sehingga diinterpretasikan bahwa masyarakat petani akan lebih mudah menjual tanahnya ketika setelah terbitnya sertifikat tanah.

Tabel 7. Hasil analisis variabel kemudahan menjual

Pengamatan	Rata -rata	Jumlah	Signifikansi	T-hitung
Sebelum	2,650	106	0,0000	-11,487
Sesudah	3,430	106		

Sumber : hasil olah data, 2017

d. Harga tanah

Tanah mempunyai kekuatan ekonomis dimana nilai atau harga tanah sangat tergantung pada penawaran dan permintaan. Dalam jangka pendek penawaran sangat inelastis, ini berarti harga tanah pada wilayah tertentu akan tergantung pada faktor permintaan, seperti kepadatan penduduk dan tingkat pertumbuhannya, tingkat kesempatan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat serta kapasitas sistem transportasi dan tingkat suku bunga (Eckert, 1990). Hasil olahan data menunjukkan terjadinya perbedaan menurut responden terhadap harga tanah sebelum dan setelah didaftarkan dalam PTSL. Nilai t-hitung untuk variabel harga tanah diperoleh -15,632 dengan tingkat signifikan (α) 5% dan derajat kebebasan 19 (Tabel 8). Maka dapat dinyatakan bahwa PSTL berdampak pada harga tanah sawah di Kelurahan Lancirang. Harga lahan sawah di Kabupaten Sidrap cenderung mengikuti produktivitas sawah yang diukur berdasarkan akses jalan dan potensi irigasi yang digunakan. Secara umum lahan – lahan sawah di lokasi penelitian merupakan lahan produktif dengan rata – rata produksi mencapai 3-4 kali dalam setahun.

Tabel 8. Hasil analisis variabel harga tanah

Pengamatan	Rata -rata	Jumlah	Signifikansi	T-hitung
Sebelum	2,070	106	0,0000	-15,785
Sesudah	2,030	106		

Sumber : hasil olah data, 2017

e. Konflik

Salah satu langkah pasti yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi konflik tanah adalah dengan mempercepat sertifikasi tanah yang dilakukan melalui administrasi tanah yang terpadu. Sengketa tanah dan sumber-sumber agraria pada umumnya merupakan konflik laten dan pihak-pihak yang bersengketa tidak hanya melibatkan individual, namun juga dalam tataran komunal (Pratiwi, 2014). Hasil analisis

diperoleh dampak program PTSL terhadap konflik lahan sawah cenderung tidak mengalami signifikansi. Nilai t-hitung untuk variabel konflik lahan diperoleh -1,265 dengan tingkat signifikan (α) 5% dan derajat kebebasan 19 yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak, dimana diperoleh $t \text{ hitung} \geq t \text{ tabel}$ ($1,265 \leq 2,093$). Sehingga disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan konflik sebelum dan sesudah didaftarkan dalam PTSL.

Tabel 9. Hasil analisis variabel konflik

Pengamatan	Rata -rata	Jumlah	Signifikansi	T-hitung
Sebelum	2,626	106	0,4211	-1,265
Sesudah	3,389	106		

Sumber : hasil olah data, 2017

4.5. Arahan dan Rekomendasi

Program PTSL telah dilaksanakan di Kelurahan Lancirang, namun selama proses pelaksanaan program ini juga mengalami kendala. Program PTSL secara umum mampu mendorong jumlah tanah sawah yang tersertifikasi. Dalam rangka memaksimalkan program PTSL ini terhadap sosial ekonomi masyarakat petani, maka diperlukan langkah strategis sebagai rekomendasi untuk penyempurnaan program ini di masa yang akan datang. Hasil pengukuran diperoleh bahwa setelah program PTSL adalah akses kemudahan menjual, hal menjadi penting untuk dipertimbangkan, karena wilayah Kelurahan Lancirang merupakan kawasan pertanian produktif. Kemudahan menjual dikhawatirkan akan mendorong terjadinya konversi lahan yang cepat. Maka perlu dilakukan proteksi lahan lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat dengan :

- Memberikan *reward* kepada petani yang masih mempertahankan lahan pertanian mereka
- Melakukan prioritas terhadap lahan – lahan yang produktif secara fisik dengan mengembangkan sarana dan prasarana pertanian yang lebih memadai
- Mengoptimalkan penyuluhan dengan pendekatan *participatory mapping* serta integrasi dengan kebaruan teknologi yang menggunakan sistem informasi geografis.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Secara umum program PTSL representatif untuk menanggapi masalah sosial ekonomi petani di Kelurahan Lancirang. Faktor yang mendorong masyarakat petani untuk terlibat dalam program PTSL adalah prosedur, waktu dan biaya PTSL. Sistem PTSL saat ini signifikan mempengaruhi masyarakat, sedangkan dari latar belakang pendidikan, usia dan luas lahan bukan faktor yang signifikan berpengaruh terhadap keterlibatan masyarakat petani dalam program ini. Dampak dari program PTSL terhadap sosial ekonomi masyarakat petani antara lain rasa aman, akses kredit, kemudahan menjual, dan harga tanah. Dampak ini mulai dirasakan setelah mereka mendaftar ataupun menerima sertifikat tanah. Pada dasarnya PTSL berdampak positif terhadap sosial ekonomi masyarakat petani, dengan adanya sertifikat maka terdapat beberapa kemudahan yang diperoleh. Hal ini mampu mendorong produktivitas lahan sawah yang dimiliki. Beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan mencakup pemberian *reward*, proteksi lahan dan kegiatan penyuluhan.

5.2. Saran

Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga hasil temuan ini diharapkan dapat dilanjutkan pada proses penelitian berikutnya. Tingkat kedalaman penilaian dampak yang masih rendah hal ini karena keterbatasan variabel atau parameter yang digunakan dan waktu pengambilan data. Selain itu faktor masa pelaksanaan program ini yang masih baru, sehingga penilaian dampak yang lebih detail dapat dilakukan setelah program ini dilaksanakan secara keseluruhan. Hal ini menjadi sebagai bentuk evaluasi terhadap program atau kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariwijayanti, E. (2011). *Pengaruh Penguasaan Lahan terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Kasus: Kampung Cijengkol, Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor Jawa Barat)*. Bogor: Institit Pertanian Bogor (Skripsi).
- BPS. (2017). *Statistik Pertanian Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

- Chomzah, A. A. (2004). *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia Jilid 2)*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Eckert, J. K. (1990). *Property Appraisal and Assesment Administration*. Chicago Illinois: IAAO.
- Eka, I. (2013). *Implikasi Kredit Pertanian Terhadap Pendapatan Petani*. Malang: Jurusan Ilmu Ekonomi dan Binis Universitas Brawijaya.
- Hermit, H. (2007). *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Wakaf*. Bandung: Mandar Maju.
- Lipton, M. (2009). *Land Refrom in Developing Conutriies. Priperty Rughts and Property Wrongs*. London: Routledge.
- Mosher. (1983). *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*. Jakarta: Yasaguna.
- Nae, F. E. (2013). Kepastian Hukum terhadap Hak Milik atas Tanah yang Sudah Bersertifikat. *Lex Privatum*, 54-63.
- Peraturan Pemerintah. (1997). *PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*. Jakarta: Peraturan Pemerintah.
- Poerwanto, R. (2008). *Pemikiran Guru Besar Institut Pertanian Bogor*. Bogor: Penebar Swadaya.
- Pratiwi, A. (2014). Analisis Hukum atas Penyelesaian Sengketa Tanah Bumi Flora Aceh. *Pena Justicia*, 159-170.
- Rachman, N. F. (2012). *Land Reform dari Masa ke Masa*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Sugiyanto, Siregar, H., & Soetarto, E. (2008). Analisis Dampak Pendafrtran Tanah Sistematis terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Kota Depok. *Jurnal Manajemen dan Agribisnis*, 64-72.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryanto. (2010). Faktor-Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Keputusan Petani Menjual Lahan. *Informatika Pertanian*, 1-15.
- Syani, A. (1987). *Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial*. Jakarta: Fajar Agung.
- Tauchid, M., & Soetarto, E. (2009). *Masalah Agraris sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Yogyakarta: STPN Press.
- Winarso, B. (2012). Dinamika Pola Penguasaan Lahan Sawah di Wilayah Pedesaan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Terapan*, 1-14.

Biodata Penulis

Penulis adalah pria kelahiran 06 Maret 1989 di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini bekerja sebagai salah satu tenaga pengajar di Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota UIN Alauddin Makassar sejak tahun 2015. Jenjang sarjana diselesaikan di jurusan Teknik PWK UIN Alauddin Makassar (2007-2011) dan magister di Ilmu Perencanaan Wilayah IPB (2012-2014). Pada tahun yang 2015 kemudian diangkat menjadi PNS di UIN Alauddin Makassar - Kementerian Agama. Penulis telah terlibat dari beberapa kegiatan penelitian dan seminar baik skala lokal, regional maupun nasional.

ISBN 978-979-1069-65-6



9

789791

069656